PENJABARAN (CASCADING) KINERJA BPKAD TERHADAP KINERJA GUBERNUR TAHUN 2021-2023

VISI RPJMD

Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)

MISI ke-5 RPJMD

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN OPD

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keungan dan Aset Daerah Provinsi Riau

INDIKATOR

Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP)

SASARAN OPD (ESELON II)

SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Waktu Penyampaian RAPBD – Waktu Penandatangan Nota Kesepakatan KUA PPAS sesuai Ketentuan	waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Waktu Penetapan APBD Provinsi Riau sesuai Ketentuan	waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
Rata-rata waktu pemrosesan SPM	Berdasarkan Pasal 129 Ayat (6) Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memproses SPM dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling lama 2 (dua) hari Sejak Tanggal diterimanya SPM	hari	2 hari	2 hari	2 hari

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau	WTP	WTP	WTP	WTP

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	(Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Yang Telah Diinventarisasi / Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan) X 100	persentase	12,60%	13,68%	14,76%

SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	(Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Evaluasi Ranperda APBD / Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau) X 100	persentase	91,66%	91,66%	91,66%

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	(Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD / Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau) X 100	persentase	100%	100%	100%

PROGRAM

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR OUTCOME	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Penetapan APBD dan Perubahan APBD yang tepat waktu	waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
		(Jumlah realisasi penyerapan APBD / Jumlah target rencana penyerapan APBD) x 100%	persentase	100%	100%	100%
		(Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dan tepat waktu / Jumalh OPD) x 100%	persentase	100%	100%	100%

KEGIATAN

1. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD	Jumlah Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD	Tepat waktu	persentase	100%	100%	100%

2. PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persentase	persentase	100%	100%	100%

3. KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah	Jumlah koordinasi Perbendaharaan daerah yang terlaksana	Jumlah persentase	persentase	100%	100%	100%

SUB KEGIATAN

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah dokumen	dokumen	12	12	4

2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah dokumen	dokumen	0	0	4

3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Terlaksananya Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah dokumen	dokumen	0	0	33

4.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Terlaksananya Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah dokumen	dokumen	0	0	33

5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Tersusunnya Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	10	10	10

6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Tersusunnya Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah dokumen	dokumen	0	0	33

7. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah dokumen	dokumen	0	0	132

8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Tersusunnya Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH	jumlah dokumen	dokumen	10	10	10

9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Terlaksananya sosialisasi dan penyusunan regulasi	Jumlah peserta desminasi dan sosialisasi Jumlah regulasi yang disusun	jumlah peserta dan regulasi	orang, regulasi	66 peserta, 2 regulasi	66 peserta, 2 regulasi	66 peserta, 2 regulasi

10. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen	dokumen	0	10	10

1. Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	laporan	12	12	12

2. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Tersusunnya Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Jumlah laporan	laporan	0	0	3

3. Evaluasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	laporan	12	12	12

4. Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran ertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	laporan	12	12	12

5. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Tersusunnya Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	dokumen	12	12	12

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	0	0	12

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	1	1	1

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Airan Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan	laporan	0	0	2

3. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Tersusunnya Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen	dokumen	12	12	12

4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Tersusunnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen	dokumen	0	0	1

5. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2021	2022	2023
Terlaksananya pembinaan penatausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina penatausahaannya	Jumlah kab/kota	kab/kota	12	12	12

p

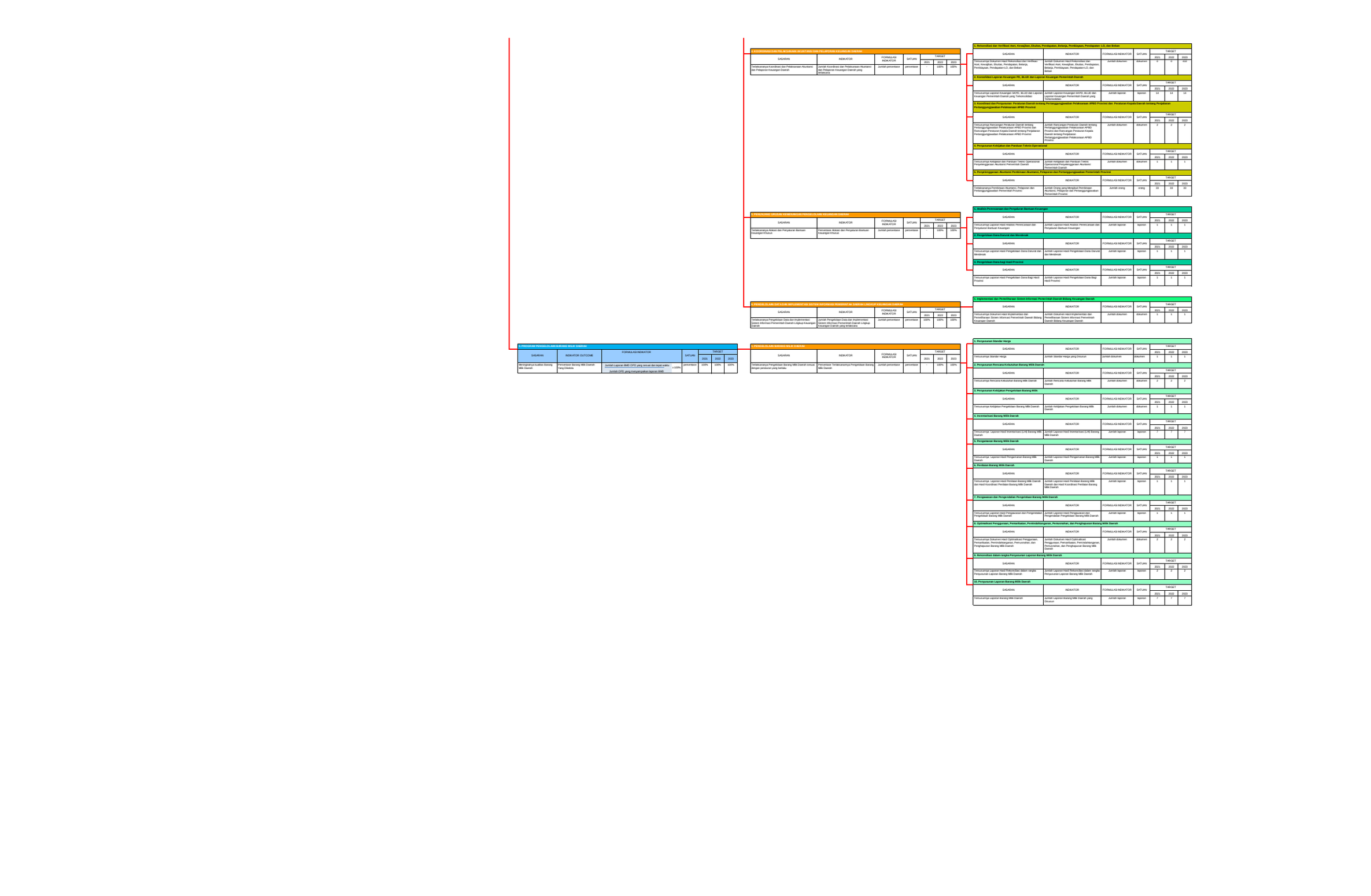
1. KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
SASARAN
INDIKATOR
FORMULASI INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2021
2022
2023
Tertatausahanya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terlaksana
Jumlah persentase
persentase
-
100%
100%
1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
Terkumpulnya Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
Jumlah dokumen
dokumen
9
9
9
2. Konsolidasi Laporan Keuangan PD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Terkumpulnya Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
Jumlah laporan
laporan
14
14
14
3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
Terkumpulnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
Jumlah dokumen
dokumen
2
2
2
5. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional
Terkumpulnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen
dokumen
1
1
1
6. Pengelenggaraan Akuntansi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Jumlah orang
orang
33
33
33
2. PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tertatausahanya Arsikan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
Persentase Arsikan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
Jumlah persentase
persentase
-
100%
100%
1. Analisis Pemrosesan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Terkumpulnya Laporan Hasil Analisis Pemrosesan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Analisis Pemrosesan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Jumlah laporan
laporan
1
1
1
2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Terkumpulnya Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Jumlah laporan
laporan
1
1
1
3. Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi
Terkumpulnya Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
Jumlah laporan
laporan
1
1
1
3. PENGALOKASIAN DAFTAR INFLASI/DEFLASI PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIKD) PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tertatausahanya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah yang terlaksana
Jumlah persentase
persentase
100%
100%
100%
1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Terkumpulnya Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Jumlah dokumen
dokumen
3
3
3
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SASARAN
INDIKATOR OUTCOME
FORMULASI INDIKATOR
SATUAN
TARGET
2021
2022
2023
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah
Persentase Barang Milik Daerah Yang Dikelola
Jumlah Laporan BMD OPD yang sesuai dan tepat waktu / Jumlah OPD yang menyampaikan laporan BMD x 100%
persentase
100%
100%
100%
1. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Bangan perolehan yang berlaku
Persentase Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah persentase
persentase
-
100%
100%
1. Pengusunan Standar Harga
Terkumpulnya Standar Harga
Jumlah Standar Harga yang Disusun
Jumlah dokumen
dokumen
1
1
1
2. Pengusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Terkumpulnya Rencana Kebutuhan barang Milik Daerah
Jumlah Rencana Kebutuhan barang Milik Daerah
Jumlah dokumen
dokumen
2
2
2
3. Pengusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik
Terkumpulnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Kebijakan Pengelolaan barang Milik Daerah
Jumlah dokumen
dokumen
1
1
1
4. Inventarisasi Barang Milik Daerah
Terkumpulnya Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
Jumlah laporan
laporan
1
1
1
5. Pengamanan Barang Milik Daerah
Terkumpulnya Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
Jumlah laporan
laporan
1
1
1
6. Pemilaan Barang Milik Daerah
Terkumpulnya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
Jumlah laporan
laporan
1
1
1
7. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terkumpulnya Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah laporan
laporan
1
1
1
8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Terkumpulnya Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen
dokumen
2
2
2
9. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Terkumpulnya Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah laporan
laporan
2
2
2
10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Terkumpulnya Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
Jumlah laporan
laporan
2
2
2